

Suksesi Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan, Dan Implikasinya

Muhammad Maulana Nazril¹, Muhammad Faishal Fadhurrahman²,
Lingga Abi Rahman³, Surya Sukti⁴

¹⁻⁴IAIN Palangka Raya

Email: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id¹, mhmdfaishalf@gmail.com²,
abielingga@gmail.com³, suryasukti72@gmail.com⁴

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Abstract. *This article discusses political leadership with a focus on the meaning of political leadership, legitimacy, structure and function of political leadership and also political leadership succession in democratic countries. The research method uses literature study or literature review. And also in collecting data, we used the Library Research method in the form of (books) and Internet Searching in the form of articles relevant to the theme created as reference material for writers. Furthermore, the aim of writing is to explain the concept of political leadership comprehensively. By referring to political leadership theories, and also providing a better understanding of the phenomenon of political leadership. Even though there are limitations in references and knowledge, the author hopes for constructive feedback and suggestions from readers to improve quality. So the author hopes to provide benefits for readers in understanding more about political leadership and also our reflections if we want to become leaders in the future.*

Keyword: *Political leadership; Legitimacy; Structure and Function of Political Leadership*

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang Kepemimpinan Politik dengan fokus pada pengertian kepemimpinan politik, legitimasi, struktur dan fungsi kepemimpinan politik dan juga suksesi kepemimpinan politik di negara demokrasi. Metode penelitian menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka. dan juga Dalam pengumpulan data, kami menggunakan metode *Library Research* berupa (buku) and *Internet Searching* berupa artikel yang relevan dengan tema yang dibuat guna acuan bahan referensi bagi penulis. Selanjutnya tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan konsep kepemimpinan politik secara komprehensif. Dengan mengacu pada teori-teori kepemimpinan politik, dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena kepemimpinan politik. Meskipun terdapat keterbatasan dalam referensi dan pengetahuan, penulis berharap adanya umpan balik dan saran konstruktif dari pembaca untuk meningkatkan kualitas. Sehingga penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami lebih lanjut mengenai kepemimpinan politik dan juga pandangan berkaca kita apabila kita ingin menjadi pemimpin dimasa mendatang.

Kata Kunci: Kepemimpinan politik; Legitimasi; Struktur dan Fungsi Kepemimpinan Politik

PENDAHULUAN

Kepemimpinan politik merupakan fenomena yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai konteks politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Konsep ini menjadi penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas suatu negara, pembangunan masyarakat, serta pengambilan keputusan yang memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks global yang terus berkembang dan berubah, pemahaman yang mendalam tentang kepemimpinan politik menjadi semakin relevan. Hal ini

disebabkan oleh pergeseran dinamika politik, munculnya tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim, konflik bersenjata, serta perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap politik secara signifikan, memperkenalkan tantangan baru seperti perubahan cepat dalam opini publik yang disebarkan melalui media sosial dan meningkatnya tekanan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan ketidaksetaraan ekonomi semakin menuntut pemimpin politik untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berkembang.

Dalam konteks ini, kepemimpinan politik menjadi landasan bagi organisasi politik dan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan politik bukan hanya tentang pengambilan keputusan atau penguasaan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin mampu mempengaruhi individu atau kelompok dalam mencapai visi-misi bersama yang diinginkan. Di sisi lain, masyarakat modern juga menuntut pemimpin politik yang tidak hanya memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap kepentingan publik. Terjadinya ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan meningkatnya populisme menunjukkan perlunya pemimpin politik yang mampu membangun kembali hubungan yang kuat dengan rakyatnya dan mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk agenda politik mereka. Pemahaman yang mendalam tentang konsep kepemimpinan politik menjadi landasan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh suatu negara atau komunitas. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai pengertian kepemimpinan politik, legitimasi kepemimpinan politik, struktur dan fungsi kepemimpinan politik sebagai landasan untuk memahami suksesi kepemimpinan politik di negara demokrasi dengan lebih baik.

METODE

Metode penelitian menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka. Dengan cara ini, penulis dapat mengumpulkan informasi yang telah ada dalam literatur untuk memahami kerangka konsep dan temuan sebelumnya terkait dengan topik penelitian ini. Studi literatur yang menyajikan gambaran komprehensif dalam memahami Kepemimpinan Politik dengan fokus pada pengertian kepemimpinan politik, legitimasi, struktur dan fungsi kepemimpinan politik dan juga Dalam pengumpulan data, kami menggunakan metode *Library Research*

berupa (buku) *and Internet Searching* berupa artikel yang relevan dengan tema yang dibuat guna acuan bahan referensi bagi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Politik

Istilah Kepemimpinan dalam kepemimpinan politik ialah seseorang yang memimpin (aktor) dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mempergunakan segala atribut yang melekat padanya dengan cara mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan sebutan politik dalam hal kepemimpinan menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).

Menurut Andrew Heywood, ada tiga cara untuk memahami kepemimpinan politik yaitu perilaku kepemimpinan, kualitas kepemimpinan, dan nilai politik. Kepemimpinan politik biasanya terjadi di infrastruktur dan suprastruktur politik atau di lembaga pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin politik berbeda dengan kepala lembaga pemerintahan karena mereka lebih menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi bawahannya. Berbeda dengan kepala lembaga pemerintahan, pemimpin politik lebih cenderung menggunakan hubungan informal dan personal untuk menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sama saja dengan tiga cara berbeda untuk kita memahami kepemimpinan politik: (1) kepemimpinan sebagai pola perilaku (2) kepemimpinan sebagai kualitas personal dan, (3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kata kuncinya adalah mempengaruhi. Kepemimpinan dikaitkan dengan karisma sebagai kualitas personal. Sementara itu, sebagai nilai politik, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan kekuatan moral maupun ideologis.

Jadi pembahasan mengenai kepemimpinan politik adalah perihal masalah realisasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin, dan berkembang menjadi hasil interaksi antara individu-individu, kelompok, lembaga, organisasi dengan pemimpin tersebut, setidaknya berputar pada permasalahan bagaimana kekuasaan aktor (pemimpin) mempergunakan semua sumber daya yang ada untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan guna dalam hal untuk pencapaian suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, maka dapat pula dinyatakan bahwa gaya dalam kepemimpinan politik dapat dilihat sebagai salah satu konsep pendekatan yang

dipakai dalam menganalisis perilaku politik pemimpin, yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan serta bagaimana memposisikan diri dan mengembangkan pengaruhnya. Gaya kepemimpinan politik, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu.

Legitimasi Kepemimpinan Politik

Mengenai legitimasi kepemimpinan politik kita harus tau apa itu legitimasi. Dalam diskusi tentang legitimasi dalam teori sosial dan politik, tampaknya ide Hegel bahwa refleksi teoritis hanya dapat terjadi ketika praktek menjadi problematis. Permasalahan tentang nilai moral atau kebenaran berbagai jenis aturan telah muncul sejak awal pemikiran sistematis tentang komunitas manusia. Deklarasi Rousseau dalam *social contract*, yang menunjukkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat disebut "absah", sehingga pemikiran tentang legitimasi ini sebagai penemuan dalam pemikiran modern. Untuk menjalankan kekuasaan dalam sebuah sistem politik diperlukan adanya sebuah legitimasi. Legitimasi sangat dekat kaitannya dengan konsep kewenangan, secara umum legitimasi diterapkan di dalam sebuah sistem politik di mana wewenang diterapkan ke pejabat-pejabat publik yang spesifik. Legitimasi adalah sebuah sifat yang memberi dukungan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya legitimasi maka pemerintah mempunyai hak untuk membuat sebuah keputusan dan masyarakat umum memiliki kewajiban untuk mematuhi.

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara konseptual, legitimasi politik didefinisikan sebagai kepercayaan pada diri orang-orang yang di perintah terhadap hak moral untuk memerintah dan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah itu. Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum. Secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.

Struktur dan Fungsi Kepemimpinan Politik

Gabriel Almond dan Powell Jr, keduanya mengaitkan struktur ini sebagai bagian dari sistem politik. Menurutnya, setiap sistem politik pasti memiliki struktur serta fungsi di dalamnya. Meski sebuah sistem terspesialisasi, tetapi semua struktur politik mempunyai sifat multifungsional. Menurut Almond dan Powell Jr (1978), struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (*maintain or change*) struktur politik, dan secara khusus, struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan

komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam setiap sistem politik. Struktur proses politik melibatkan bagaimana fungsi artikulasi kepentingan, agregasi, pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik. Struktur proses melibatkan berbagai kelompok kepentingan, antara lain partai politik, media massa, eksekutif, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan politik merupakan faktor terpenting untuk kemajuan dan perkembangan sebuah negara yang menganut sistem demokratis. Fungsi kepemimpinan politik dalam mencapai tujuan desanya sangat diperlukan. Menurut (Fahmi, 2012) menyatakan kepemimpinan politik adalah sebuah keahlian yang berfungsi dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain kepada pencapaian tujuan. Sedangkan (Pasalong, 2008) mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan politik dapat tinjau dari:

1. Fungsi perintah yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya.
2. Fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin.
3. Fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin.
4. Fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan.

Sukses Kepemimpinan Politik di Negara Demokrasi

Dalam sistem politik demokratis, partai politik dan pemilu merupakan satu kesatuan. Pemilu adalah tempat di mana partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam sistem politik demokratis, pemilu dan parpol terkait satu sama lain. Pemahaman ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Syamsuddin Haris, yang menyatakan bahwa parpol dan pemilu merupakan komponen utama sistem pemerintahan demokrasi. Parpol menggabungkan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan pemilu adalah arena kontestasi demokrasi di mana parpol maupun kandidatnya saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dan mandat politik publik. Syamsuddin Haris menyatakan bahwa partai politik dan pemilu bukanlah bagian dari pemerintahan, tetapi harus ada dalam tata-kelola politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu harus diadakan dengan mengutamakan kebebasan, kerahasiaan, dan persaingan. Diharapkan juga bahwa partai politik dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem politik yang demokratis. Akibatnya, tidak salah jika

pengamat dengan percaya diri menyatakan bahwa pemilu merupakan tolak ukur kemajuan demokrasi sebuah negara. Dan keinginan akan adanya pemerintahan demokratik bisa dibentuk secara konstitusional.

Suksesi kepemimpinan politik di negara demokrasi, termasuk di Indonesia, adalah proses pergantian kekuasaan politik yang berlangsung melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan hukum negara. Dalam konteks Indonesia, suksesi kepemimpinan ini terjadi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, yang diadakan secara berkala untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan pejabat daerah.

KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal. KPU harus mampu memastikan proses pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. *Pertama*, Peranan KPU Dalam Sosialisasi Politik Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas. *Kedua*, Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas Pengertian aksesibilitas menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) yang memuat ketentuan tentang tujuan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Maksudnya memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk memakai suara hak pilihnya dalam menjalankan pemilihan demokrasi. *Ketiga*, Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-

partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan ke semua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Awal sejarah demokrasi di Yunani juga sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern maupun saat ini. Kehidupan masyarakat yang dijalankan berdasarkan sistem demokratis di bawah *rule of law*. Misalnya:

1. Adanya perlindungan konstitusional, dengan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah *pertama*, Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. *Kedua*, tingkat persamaan hak di antara warga negara. *ketiga*, Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara. *Keempat*, Sistem perwakilan dan. *Kelima*, Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas. Karakteristik paling mendasar dari setiap sistem demokrasi adalah pandangan tentang warga negara (orang) yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perantara wakil. Asumsi utama dari pandangan ini adalah bahwa orang harus memiliki hak untuk mendiskusikan kebijaksanaan negara tentang hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik dipandang baik oleh rakyat, karena dengan demikian rakyat merasa ikut bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan akan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Didalam Suksesnya kepemimpinan politik di negara demokrasi sudah pasti adanya tantangan utama yang akan kita lalui salah satunya ialah politik uang (*money politic*) atau suap sehingga menjadi cikal bakal korupsi. Dunia politik pasti akan menjadi lebih buruk jika politik uang terus berlanjut. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural hanya akan menguntungkan mereka yang penuh hasrat untuk menguasai kursi kekuasaan negara. Sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Kemudian, kekuatan itu akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah mereka habiskan. Ia bahkan tidak segan

segi melakukan segala hal untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kebijakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok tertentu selalu mengorbankan masyarakat yang dibawah. Akibatnya, politik uang harus dianggap sebagai pelanggaran besar dalam politik Indonesia. Masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan melawan praktik politik uang. Tindakan nyata adalah dengan tidak memilih calon yang berupaya untuk memenangi pemilu dengan modus memberikan uang, barang dan jasa. Calon pemimpin dengan modus yang demikian, tentunya akan mengorbankan masyarakat umum jika berhasil memimpin. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang menggunakan politik uang dan tidak *pro* rakyat. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan mencegah praktik *money politics*, korupsi juga dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan. Dan tidak lupa pelanggaran korupsi sudah pasti harusnya diberatkan bukan ditinggalkan.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan kami dalam rumusan masalah yaitu; kepemimpinan politik melibatkan seseorang yang memimpin dalam konteks politik dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain melalui atribut yang dimilikinya atau menggunakan *prestise*, kekuasaan, atau posisi. Ini terjadi baik dalam infrastruktur politik (seperti partai politik dan organisasi masyarakat) maupun dalam suprastruktur politik (lembaga pemerintahan). Andrew Heywood menyediakan tiga pendekatan untuk memahami kepemimpinan politik, yaitu melalui perilaku kepemimpinan, kualitas kepemimpinan, dan nilai politik. Ini mencakup bagaimana pemimpin menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan politik.

Legitimasi adalah sebuah sifat yang memberi dukungan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya legitimasi maka pemerintah mempunyai hak untuk membuat sebuah keputusan dan masyarakat umum memiliki kewajiban untuk mematuhi. Secara konseptual, legitimasi politik didefinisikan sebagai kepercayaan pada diri orang-orang yang di perintah terhadap hak moral untuk memerintah dan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah itu. Struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (*maintain or change*) struktur politik, dan secara khusus, struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam setiap sistem politik. Sedangkan fungsi kepemimpinan politik dapat tinjau dari: (1) Fungsi perintah yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya; (2) Fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat

tergantung pada pihak pemimpin; (3) Fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin; (4) Fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan.

Suksesi kepemimpinan politik di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik, KPU, hingga masyarakat pemilih. Meskipun terdapat tantangan seperti politik uang dan korupsi, sistem demokrasi di Indonesia telah memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan pergantian kepemimpinan berlangsung secara damai dan teratur. Kedepan, semoga adanya peningkatan pendidikan politik dan penguatan integritas pemilu akan menjadi kunci penting untuk memperbaiki proses suksesi kepemimpinan politik dinegara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2009). *Menjadi pemimpin politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhakhiri, H., & Djafar, T. B. M. (2015). Struktur politik Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 11(1).
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen kepemimpinan: Teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Felinda, O., & Zetra, A., & Rosyidi, B. (2024). Gaya kepemimpinan politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1).
- Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Joyce, P. (2003). *Teach yourself politics*. London: Hodder Headline.
- Naim, A. (2014). Tipologi kepemimpinan politik Gus Dur. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(1).
- Pasalong, H. (2008). *Kepimpinan birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rusdianto, M. (2018). Kekuasaan dan legitimasi politik Islam menurut perspektif pemikiran Ibnu Khaldun. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sacipto, R. (2019). Kajian praktik money politics dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai cikal bakal tindak pidana korupsi. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252-261.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan hukum people power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 225-237.